

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merubah tata cara pengajuan dan perolehan izin usaha karaoke yang semula dilaksanakan secara manual menjadi daring (*online*). Meskipun demikian, pengajuan perizinan usaha karaoke tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dimana tetap memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI melalui PTSP yang terpusat di pemerintah pusat melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission / OSS*). Sistem OSS juga memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan pengawasan, yakni dalam hal pemenuhan komitmen pengusaha karaoke dan sekaligus memberikan kewenangan dalam penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam sistem OSS serta memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Provinsi DKI untuk menambah jenis sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi terhadap usaha karaoke yang tidak memenuhi ketentuan izin usaha karaoke sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Izin

ABSTRACT

Government Regulation Number 24 Year 2018 Concerning Electronic Integrated Business Licensing Licensing Services changes the procedures for filing and obtaining a karaoke business permit which was originally carried out manually into online. Nevertheless, the application for karaoke business licensing still refers to the Regulation of the Minister of Tourism of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2016 Regarding Tourism Business Registration, which still gives authority to the Regency / City Regional Government and DKI Provincial Government through PTSP which is centralized in the central government through the Business Licensing Service System Electronically Integrated (Online Single Submission / OSS). The OSS system also gives authority to Regency / City Regional Governments and DKI Provincial Governments to supervise, namely in terms of fulfilling the commitment of karaoke entrepreneurs and at the same time giving authority in imposing sanctions as referred to in the OSS system and granting freedom to Regency / City and Provincial Governments DKI to increase the types of sanctions and mechanisms for imposing sanctions on karaoke businesses that do not meet the provisions of the karaoke business permit as they should.

Keywords: *Permit*